

Pasar Gubug Grobogan Terbakar

GROBOGAN (KR) - Pasar Gubug Kabupaten Grobogan, Jateng, Selasa (5/11) dini hari terbakar. Setidaknya 797 kois, los dan lapak milik pedagang hangus. Hingga kemarin siang, penyebab kebakaran penyelidikan Tim Labfor. Di lokasi kejadian, masih ada sejumlah mobil pemadam kebakaran dan dijaga belasan aparat kepolisian dan satpol PP. Lokasi itu pun dipasang garis polisi agar masyarakat yang menotnon tidak masuk ke area pasar.

Kebakaran hebat pasar terbesar kedua di Grobogan itu sempat membuat panik warga sekitar. Pasalnya, lokasi pasar di Jalan Bhayangkara Gubug itu dekat dengan pemukiman penduduk. Api terlihat membumbung tinggi dan merembet ke los-los yang ada di dalam pasar dalam waktu yang sangat cepat. Saat kejadian, pedagang dan warga sekitar berhamburan keluar dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Sekitar setengah jam kemudian, baru datang 11 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) di lokasi untuk memadamkan api.

Kapolres Grobogan AKBP Dedy Anung Kurniawan mengungkapkan, berdasarkan informasi yang ia terima, api diduga berasal dari arah utara pasar. Untuk yang terbakar, saat ini ada 797 lapak, toko, dan los. Rinciannya yaitu Blok A sebanyak 44 toko dan 135 los, Blok B ada 46 toko dan 144 los, Blok C 146 lapak, Blok D ada 149 lapak, dan Blok E ada 133 lapak.

"Alhamdulillah api sudah mulai padam. Personel Dalmas Polres dan Polsek masih berada di lokasi untuk melakukan pengamanan," ungkap Kapolres.

Kapolsek Gubug AKP Sunarto menambahkan, kebakaran Pasar Gubug dipastikan tidak ada korban jiwa. Namun, kerugian yang ditanggung seluruh pedagang diperkirakan mencapai puluhan miliaran rupiah. "Korban jiwa nihil. Kerugian belum bisa ditaksir. Namun diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah," imbuhnya. **(Tas)-d**



KR-M Taslim

Suasana Pasar Gubug yang terbakar.

Anggota KPPS Kabupaten Magelang Dilantik

MAGELANG (KR) - Sebanyak 14.077 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pilkada Serentak 2024 di wilayah Kabupaten Magelang dilantik, Kamis (7/11). Pelantikan dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) atas nama KPU Kabupaten Magelang, dan dipusatkan di masing-masing desa atau kelurahan di wilayah ini.

"Hari ini ada 14.077 anggota KPPS untuk Pilkada Serentak di Kabupaten Magelang dilantik. Mereka akan bertugas di 2.011 TPS, jadi 7 orang setiap TPS," kata Ketua KPU Kabupaten Magelang Ahmad Rofik. Dikatakan Rofik, pihaknya telah melakukan pembukaan pendaftaran untuk KPPS pada 17 hingga 28 September lalu. Setelah itu, dilanjutkan tahapan penelitian administrasi pada 18 hingga 29 September 2024. Pengumuman hasil seleksi administrasi mulai 30 September 2024 hingga 2 Oktober 2024.

Tahap selanjutnya, tambah Rofik, adalah tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS, yang dimulai pada tanggal 30 September 2024 hingga 5 Oktober 2024. Kemudian masuk tahapan, pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS pada 5-7 Oktober 2024 dan ditetapkan, sekaligus dilantik pada 7 November 2024. "Mereka akan bertugas selama satu bulan mulai tanggal 7 November 2024 hingga 8 Desember 2024 mendatang," tambahnya.

Setelah pelantikan, mereka akan menjalani beberapa kali Bimbingan Teknis (Bimtek) yang akan dilakukan oleh PPS. Bimtek ini berkaitan dengan penjelasan tentang integritas, netralitas dan profesionalitas penyelenggara pemilihan, tugas, kedudukan, kewajiban, larangan dan kewenangan KPPS.

Selain itu juga soal kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara serta penjelasan teknis soal persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan Aplikasi Sirekap.

Sementara itu pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Magelang terdapat 1.014.525 pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tersebar di 21 kecamatan. Jumlah tersebut terdiri dari 506.239 pemilih laki-laki dan 508.286 pemilih perempuan. **(Tha)-f**



KR-Chandra AN

KURSI antik penghias Kota Lama Semarang yang keberadaannya dimaksudkan untuk mempercantik kawasan justru sering dimanfaatkan orang untuk istirahat hingga tertidur lelap. Kondisi demikian justru membuat kawasan tidak nyaman bagi wisatawan yang hendak menikmati suasana dengan duduk-duduk santai.



KR-Chandra AN

BATIK Ecoprint kini makin digemari karena keunikannya dan coraknya yang kreatif dan menarik. Dua aktifis Kebaya Diajeng Semarang (KDS) menunjukkan karya-karya batik ecoprint motif dedaunan dalam sebuah workshop belum lama ini di Pudakpayung Semarang. Kain batik ecoprint ini didesain menjadi aneka tas dan berbagai jenis baju untuk memenuhi selera pasar.

CALON GAGAL MULAI ATUR STRATEGI

Pengisian Perdes 2024 Semakin Seru

PATI (KR) - Hiruk pikuk penjarangan perangkat desa (perdes) 2024, kini memasuki babak baru. Usai tahapan pengumuman, memantik sejumlah calon gagal mulai atur strategi.

"Diantaranya, ada yang akan melapor ke Aparat Penegak Hukum (APH), mengirim surat keberatan ke panpel. Ada juga yang akan meminta kembali uang down payment (DP), yang pernah diserahkan ke pihak tertentu," jelas Ditektur Lembaga Joeang Pati, Fatkurochman SH MH, Rabu (6/11).

Menurutnya, calon gagal yang akan melapor ke APH karena merasa menjadi korban penipuan. Sedangkan yang mengirim

surat ke panpel, karena ingin menunggu keputusan terbaru dari Pembak Pati. Himpunan kasus yang dilaporkan ke Lembaga Joeang, tutur Fatkurochman, ada calon yang dijanjikan dapat jabatan Sekdes dengan total biaya Rp 1 miliar. "Meski sudah bayar panjar Rp 90 juta lengkap dengan bukti kuitansi, ternyata pemohon tidak lulus ujian tes tertulis," ungkapnya.

Menurutnya, modus yang dimainkan pihak ter-

tentu, adalah memberi janji akan bisa mengurus kelolosan namun harus menyerahkan uang panjar. "Janji tersebut, disampaikan ke semua pendaftar," kata Fatkurochman. Menjawab pertanyaan wartawan, Direktur Joeang, Fatkurochman mengaku masih menunggu jawaban dari penjabat (Pj) Bupati Pati, Sujarwanto Dwiatmoko. Karena sebelumnya, dia berkirim surat keberatan atas izin pengisian perdes 2024.

"Kami keberatan dan meminta Pj Bupati Pati untuk membatalkan surat nomor 141.4/2661.4 tentang Izin Pengisian Perangkat Desa Tahun 2024," ucap Fatkurochman. Sebagaimana diberitakan, Pemkab Pati mengeluarkan ijin pengisian perangkat desa tahun 2024. Yaitu di 125 desa (17 kecamatan), yang akan mengisi 264 formasi jabatan perangkat desa. Terdiri dari lowongan 42 sekretaris desa, serta 222 formasi kepala seksi dan kadus.

Tes tertulis dilaksanakan secara menyebar

di beberapa tempat. Jumat (1/11). Ada yang di gedung UTC Semarang, di IKIP Semarang, serta ada juga yang dilaksanakan di kantor kecamatan Dukuhseti dan Winong. Selanjutnya, pengumuman hasil tes dibuka Senin (4/11). Sementara itu, tokoh perangkat desa tahun 2024. Yaitu di 125 desa (17 kecamatan), yang akan mengisi 264 formasi jabatan perangkat desa. Terdiri dari lowongan 42 sekretaris desa, serta 222 formasi kepala seksi dan kadus. Tes tertulis dilaksanakan secara menyebar

APEL SIAGA PENGAWASAN PEMILUKADA 2024

Bawaslu dan Jajaran Siap Laksanakan Pilkada

MAGELANG (KR) - Rangkaian kegiatan Apel Siaga Pengawasan Pemilu 2024 yang dilaksanakan Bawaslu Kota Magelang di halaman Kantor Bakorwil Kedu diwarnai dengan pemecahan kendi berisi air bersama oleh beberapa pihak atau pejabat, termasuk Sekretaris Daerah Kota Magelang Hamzah Kholif, Ketua Bawaslu Kota Magelang Maludin Taufiq SIP maupun lainnya, Kamis (7/11).

Kepada KR usai kegiatan apel, Ketua Bawaslu Kota Magelang mengatakan kegiatan apel ini dimaksudkan memberikan informasi, memberikan gambaran, bahwa Bawaslu Kota Magelang dan jajaran siap melaksanakan pilkada secara keseluruhan dengan baik. "Baik disini maksudnya profesional, berintegritas, mandiri," katanya.



KR-Thoha

Pemecahan kendi oleh beberapa pihak.

Berkaitan dengan pemecahan kendi, dikatakan, hal itu dimaksudkan pengendalian diri. "Kita sebagai pengawas harus bisa mengendalikan diri juga," tambahnya. Selain itu juga harus mampu menjelaskan kepada masyarakat, kepada peserta pemilu, bahwasanya Bawaslu bekerja sesuai dengan regulasi yang ada.

Pjs Walikota Magelang Ahmad Aziz dalam sam-

butan tertulisnya, yang dibacakan Sekretaris Daerah Kota Magelang, diantaranya menekankan kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Magelang agar senantiasa menjaga netralitas. Netralitas ASN adalah syarat mutlak untuk menjalankan tugas pemerintah yang adil dan berintegritas dalam proses pemilihan ini. Sikap netral ASN tidak hanya menjaga marwah institusi, tetapi

juga memberi contoh kepada masyarakat untuk mendukung terciptanya suasana pemilu yang tertib dan kondusif.

"Tidak hanya itu, suksesnya pemilihan serentak ini memerlukan kerja sama yang erat dari semua pihak," tambah Pjs Walikota Magelang sambil mengajak semua lapisan masyarakat untuk turut serta menjaga ketertarikan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. "Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan pemilu yang tertib, nyaman dan bersih dari segala bentuk intimidasi ataupun pelanggaran," jelasnya.

Di forum ini Kapolres Magelang Kota AKBP Dhanang Bagus Anggoro SIK MH dalam sambutan tertulisnya, yang dibacakan Kapolsek Magelang Utara AKBP Purwanto, di-

antaranya mengatakan semua memiliki peran sangat penting dalam kesuksesan Pilkada 2024, mulai dari KPU yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pilkada, Bawaslu yang bertugas mengawasi jalannya tahapan pilkada, hingga petugas pengawas TPS yang berada langsung di lapangan.

Komandan Kodim 0705/-Magelang Letkol Inf Jarot Susanto SH MSi dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Perwira Penghubung (Pabung) Kodim 0705/Magelang yang juga Plt Komandan Koramil Magelang Tengah Kapten Inf Rizky Sudarmanto diantaranya mengatakan pengawasan pemilu bukan hanya tugas Bawaslu atau aparat keamanan, melainkan menjadi tanggung jawab bersama sebagai masyarakat Indonesia. **(Tha)-f**

KOTA MAGELANG TERBAIK I DI JATENG

Atas Kinerja Pengawasan Terbaik 2023

MAGELANG (KR) - Pemerintah Kota Magelang meraih penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Predikat Terbaik I di Provinsi Jateng atas Kinerja Pengawasan Terbaik Tahun 2023. Penghargaan diserahkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno dan diterima Pjs Walikota Magelang Ahmad Aziz di forum Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Surakarta, Rabu (6/10) lalu.

"Saya apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja kepada yang pertama tentu Inspektorat dan teman-teman yang ada OPD di Kota Magelang. Pertahanan nilai 9 (indikator) itu sehingga akuntabilitas dan integritas kita terjaga dan juga semakin baik," kata Ahmad Aziz usai menerima penghargaan itu.

Disebutkan 9 indikator penilaian, antara lain persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, nilai evaluasi SAKIP tahun 2023, Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2023, Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dan SPI tahun 2023. "Selain itu juga Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tahun 2023, nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) tahun 2023, Nilai indeks efektivitas pengendalian korupsi tahun 2023 dan nilai kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tahun 2023," katanya.

Inspektur Kota Magelang Larsita SE MSc mengatakan dengan prestasi ini diharapkan menjadi motivasi dan semangat bagi seluruh jajaran APIP di



KR-Dokumen

Penyerahan penghargaan pengawasan terbaik.

Inspektorat Kota Magelang untuk terus meningkatkan kinerja dan mencapai hasil yang lebih baik lagi. "Selain itu juga untuk mendorong Inspektorat Kota Magelang untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan kami, melalui beberapa strategi antara lain meningkatkan kompetensi dan kapabilitas APIP, memperbaharui

metode pengawasan, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan," kata Larsita.

Dikatakan juga, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong peningkatan kinerja pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Upaya-upaya itu antara lain, pela-

ntihan dan pengembangan pada auditor secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas dan penerapan standar audit internal secara konsisten dan profesional.

Kemudian, APIP perlu dilengkapi dengan teknologi informasi yang memadai, membangun kerja sama kemitraan dengan pihak terkait, membangun budaya pengawasan yang kuat untuk mendorong semua pihak (entitas) untuk bertanggung jawab dan akuntabel atas tindakannya. Evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan yang ada dan merumuskan strategi perbaikan untuk memastikan efektivitas pengawasan, serta publikasi hasil pengawasan secara transparan dan akuntabel," papar Larsita. **(Tha)-f**